

REFERENSI

- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. 2014. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Fifteenth Edition. USA: Pearson Education Limited.
- BPK RI. 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- . 2008. Keputusan BPK-RI Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
- BPKP RI. 2012. Peraturan Kepala BPKP NOMOR:PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi.
- . 2014. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Braun, V., dan Victoria Clarke. 2006. *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology* Vol 3 (2): Pages 77-101.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih di antara Lima Pendekatan*. Tiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Davis, Charles, R. Farrell, dan S. Ogilby. 2010. “*Characterist and Skills of the Forensic Accountant*.” AICPA, FVS Section.
- DiGabriele, James A. 2010. “*An Empirical Investigation of The Relevant Skill of Forensic Accountants*.” *Journal of Knowledge Management* Volume 1, No. 2: Pages 34-47.
- Kabupaten Bantul. 2007. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- . 2008. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bantul.
- . 2016. *Tugas Inspektorat Kabupaten Bantul*. <http://inspektorat.bantul.kab.go.id/hal/profil>. Diakses pada 23 Februari 2016 pada Pukul 20.05 WIB.
- Mahkamah Agung. 2013. Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
- . 2014. Putusan Mahkamah Agung Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk.

- . 2015. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tentang Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- . 2015. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Pid.Sus- TPK/2015/PN.YYK. Mahkamah Konstitusi. 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.
- Makawimbang, Hernold F. 2014. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- . 2015. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Moleong, L. J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murwanto, R, A Budiarmo, dan F. H. Ramadhana. 2006. *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI.: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah,.
- Pengadilan Negeri Yogyakarta. 2016. “*Tugas Pokok dan Fungsi*.” <http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/link/20160110144601335856920c390bbd1u.html>. Diakses pada 21 Februari 2016 pada Pukul 21.25 WIB.
- Ramamoorti, S., D. Morrison, dan J. W. Koletar. 2014. “*Bringing Freud To Fraud: Understanding The State-Of-Mind Of The C-Level Suite/White Collar Offender Through ‘A-B-C’ Analysis*.” *Journal of Forensic & Investigative Accounting* Vol. 6 (Issue 1).
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- . 1999. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- . 2001. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- . 2001. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- . 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- . 2006. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- . 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- . 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- . 2009. *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- . 2009. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- . 2014. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- . 2014. Undang-Undang No. 16 Tahun 20014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Rezaee, Z., D. L. Crumbley, dan R. C. Elmore. 2006. *“Forensic accounting education; A survey of academicians and practitioners.”* Journal of Forensic Accounting Vol.10 No.3: PP, 48 – 59.
- Soepardi, Eddy M. 2009. *“Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi.”* Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Salemba Empat.
- Williams, J. W. 2002. *“Playing the Corporate Shell Game: The Forensic Accounting and Investigation Industry, Law, and the Management of Organizational Appearances.”* Doctoral Dissertation, Toronto: York University. Dissertation Abstracts International.
- Yuntho, E., Illian D. A. Sari, J. Limbong, R. Bakar, dan F. Ilyas. 2014. *“Hasil Penelitian: Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi.”* Jakarta: Indonesia Corruption Watch.